

**“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PADANG”
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1)
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :
Nory Wandasari
2005/ 64822

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah Kota Padang (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang)

Nama : Nory Wandasari

Bp/Nim : 2005/64822

Program Studi : Akuntansi

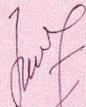
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2012

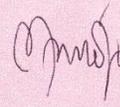
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Pembimbing II



Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19720910 199802 2 003

Ketua Prodi Akuntansi

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

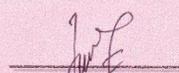
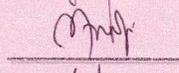
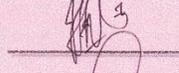
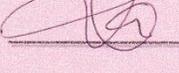
*Dinyatakan Lulus
Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PADANG
(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang)

Nama : Nory Wandasari
Bp/Nim : 2005/64822
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2012

Tim Penguji:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	
2.	Sekretaris	: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	
3.	Anggota	: Herlina Helmy, SE, ME, Ak	
4.	Anggota	: Deviani, SE, M.Si, Ak	

ABSTAK

Nory Wandasari 2005/64822 : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah Kota Padang. (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)

Pembimbing I : Lili Anita, SE, M.Si, Ak

II : Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah pada pemerintah Kota Padang. Untuk itu dilakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis data yang digunakan analisis faktor dengan menggunakan SPSS versi 15.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Padang, yaitu: faktor 1 (lingkungan pengendalian) sebesar 18,987%, faktor 2 (penilaian resiko) sebesar 12,060%, dan faktor 3 (kegiatan pengendalian) sebesar 8,089%.

Untuk peneliti selanjutnya dapat dilakukan perluasan sampel dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang mungkin menjadi faktor pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah pada pemerintahan baik pusat maupun daerah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan membukakan mata hati dan fikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang)”** . Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I, dan Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Orang tua dan adik-adik beserta keluarga besarku yang telah memberikan bantuan maupun dorongan baik dalam hal materi, fisik maupun moril yang tak terhingga besarnya bagi penulis dari awal pendidikan sampai skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi angkatan 2005 dan adik-adik angkatan 2006-2008 yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini, penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, Maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Perumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	11
1. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ..	11
2. Lingkungan Pengendalian.....	19
3. Penilaian Resiko	22
4. Kegiatan Pengendalian	25
B. Penelitian Terdahulu	28

C. Kerangka Konseptual	29
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Populasi dan sampel	31
C. Jenis Data dan Sumber Data	33
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Instrumen Penelitian	34
F. Pengujian Kualitas Data.....	36
G. Teknik Analisis Data	39
H. Defenisi Operasional	43
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	45
B. Demografi Responden	46
C. Deskripsi Hasil Penelitian.....	49
D. Statistik Deskriptif... ..	54
E. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	55
F. Analisis Fakor	57
G. Pembahasan	65
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Keterbatasan Penelitian	73
C. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar nama dan alamat SKPD di Kota Padang	32
2. Daftar skor jawaban.....	35
3. Kisi-kisi instrumen penelitian	35
4. Uji Valid Instrumen Penelitian.....	37
5. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	39
6. Tingkat Pengembalian Kuisisioner.....	46
7. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin	47
8. Jumlah responden berdasarkan jenjang pendidikan.....	47
9. Jumlah responden berdasarkan masa kerja.....	48
10. Distribusi frekuensi Lingkungan Pengendalian.....	49
11. Distribusi frekuensi Penilaian Resiko.....	51
12. Distribusi frekuensi Kegiatan Pengendalian.....	53
13. Statistik Deskriptif	55
14. Uji Validitas.....	56
15. Uji reliabilitas	57
16. KMO and Bartlett's Test	58
17. Indikator yang tidak memenuhi nilai Anti Image Correlation.....	58
18. Communalities	59

19. Penentuan Jumlah Faktor	61
20. Faktor-Faktor Efektivitas Pelaksanaan SPIP.....	63
21. Indikator yang Tidak Termasuk dalam Hasil Analisis Faktor Matriks...	64
22. Faktor Lingkungan Pengendalian	66
23. Faktor Penilaian Resiko	68
24. Faktor Kegiatan Pengendalian	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Lampiran 1. Format Kuesioner Penelitian.....	78
2. Lampiran 2. Uji Validitas dan Realibilitas	83
3. Lampiran 4.Uji valid data penelitian	86
4. Lampiran 5. Analisis faktor	90
5. Lampiran 6. Surat penelitian dari fakultas.....	97
6. Lampiran 7. Surat Rekomendasi dari Kesbangpol & Limnas Kota Padang.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada bulan Agustus 2008 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan ini penjabaran dari Pasal 58 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni Presiden selaku kepala negara mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Berdasarkan pemikiran tersebut dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat 4 yang menjelaskan bahwa menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilaksanakan dalam lingkungan pemerintah negara adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan.

Sistem pengendalian intern dikatakan berkualitas apabila sistem pengendalian intern tersebut telah dirancang dengan baik dan dilaksanakan

secara efektif sesuai dengan yang telah ditetapkan sehingga tercapailah tujuan dari suatu pemerintah daerah.

Menurut Agung (2008) lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Lingkungan organisasi yang menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orang di sekitarnya. Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern manajemen yang baik dan sehat. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan sub komponen yang paling penting dalam lingkungan pengendalian yang terdiri dari integritas dan nilai-nilai etis, komitmen dan kompetensi, struktur organisasi, dan hubungan kerja yang baik.

Menurut Arens (2008) penilaian resiko atas laporan keuangan merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan (*generally accepted accounting principles*) GAAP. Apabila manajemen menilai resiko adalah bagian dari perencanaan dan pelaksanaan pengendalian internal yang efektif untuk meminimalkan kekeliruan serta kecurangan, sedangkan auditor menilai resiko dan merespon resiko tersebut untuk bahan bukti dalam melakukan audit. Maka penilaian

resiko perlu dilaksanakan dalam sistem pengendalian intern untuk dapat meminimalkan resiko yang terjadi sehingga sistem pengendalian intern pemerintah menjadi efektif.

Pengendalian risiko harus memberikan penilaian atas laporan keuangan, karena risiko yang dihadapi organisasi baik dari luar maupun dari dalam organisasi, penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Menurut Arens (2008) kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko, kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat organisasi, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis dan kegiatan pengendalian tersebut dievaluasi secara teratur oleh pimpinan organisasi dan bawahannya untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Menurut Arens (2008) kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi, kegiatan pengendalian terdiri dari pemisahan tugas yang memadai, rewiu atas kinerja, pembinaan atas sumber

daya manusia, pengendalian fisik, dan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting. Pimpinan instansi harus melakukan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat berdasarkan fungsi dari instansi tersebut.

Dari variabel diatas, lingkungan pengendalian merupakan payung atau pondasi bagi penilaian resiko, dan kegiatan pengendalian. Menurut Arens (2008) tanpa lingkungan pengendalian yang efektif, maka penilaian resiko, dan kegiatan pengendalian, tidak akan menghasilkan pengendalian internal yang efektif, tanpa menghiraukan kualitasnya. Dalam sistem pengendalian intern pemerintah, lingkungan pengendalian sangatlah penting karena lingkungan pengendalian merupakan payung atau pondasi penegak dari penilaian resiko dan kegiatan pengendalian. Dengan baiknya kualitas dari lingkungan pengendalian, maka penilaian resiko dan kegiatan pengendalian juga akan baik, sehingga sistem pengendalian intern pun juga akan efektif.

Pada Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan pelaksanaan pemeriksaan negara, hal ini merupakan langkah baik karena pemerintah ingin menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama ini.

Kelemahan pengendalian intern atas pemerintah daerah sebagian besar karena belum memadainya unsur lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian. Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya

menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI. Namun, masih terdapat kelemahan dalam lingkungan pengendalian terlihat dari kurang dipahaminya tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja serta kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan.

Hasil evaluasi SPI oleh BPK dalam IHPS (tahun 2010) menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; (2) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan (3) kelemahan struktur pengendalian intern.

Hasil evaluasi BPK dalam IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) Tahun 2010 atas 348 LKPD terdapat 3.179 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas 1.256 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 1.389 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 534 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

Berdasarkan laporan BPK (tahun 2010) hal tersebut masih terjadi karena lemahnya Sistem Pengendalian Intern dan belum mampunya Kabupaten/Kota melaporkan pertanggungjawabannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dalam menyusun laporan keuangan dan sebab-sebab lainnya, yang diantaranya: (1) perencanaan tidak memadai, belum adanya koordinasi antara pihak-pihak terkait, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan maupun pengendalian kegiatan serta

kompetensi SDM yang tidak memadai, (2) pejabat yang bertanggung jawab lalai, dan pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, (3) pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta tidak cermat dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, pada penelitian ini penulis berfokus hanya pada tiga variabel penentu untuk efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, dan kegiatan pengendalian yang diperkirakan menjadi faktor-faktor dominan dalam mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Karena dari banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengendalian intern lainnya ketiga faktor tersebut yang banyak terjadi di lapangan.

Dari semua uraian dan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah Kota Padang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas masalah yang dapat di identifikasi adalah :

1. Apakah lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ?
2. Apakah ketidak hati-hatian berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ?
3. Apakah biaya dan manfaat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ?
4. Apakah penilaian resiko berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ?
5. Apakah kegagalan komunikasi berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ?
6. Apakah kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ?
7. Apakah pemantauan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pemerintah daerah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah-masalah yang akan menjadi pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)?
2. Apakah penilaian resiko berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)?
3. Apakah kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh lingkungan pengendalian terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Pengaruh penilaian resiko terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Pengaruh kegiatan pengendalian terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan akuntansi pemerintahan.
2. Bagi instansi pemerintah, untuk member masukan tentang apa saja yang bisa mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
3. Bagi akademik, sebagai khasanah penelitian terutama di bidang pemerintahan, dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa di lingkungan akademika.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Siagian dalam Theresia (2009) memberikan definisi efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Ndaha dalam Apridona (2009) efektivitas adalah tingkat keberhasilan pencapaian atau pelaksanaan suatu tujuan, dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara proses/realisasi terhadap target/tujuan. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa jika proses/realisasi rendah maka target/tujuan tercapai dengan tingkat efektivitas rendah.

Menurut Anthony dalam Theresia (2009) efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapai. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelum dimulainya aktivitas tersebut.

Menurut Arens (2008) tujuan pengujian efektivitas pelaksanaan pengendalian adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan

seperti yang dirancang, dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian itu secara efektif. Selain itu menurut Widjajanto (2001) agar dapat berjalan efektif, pengendalian intern memerlukan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas dalam organisasi, setiap fungsi harus ada penanggung jawab secara khusus. Tujuannya adalah agar setiap karyawan dapat mengkonsentrasikan perhatian kepada lingkup tanggung jawabnya masing-masing sehingga tidak ada suatu fungsi yang tidak tertangani.

Menurut Jusuf (2003) efektivitas pengendalian intern ditentukan oleh kompetensi dan ketergantungan orang yang menggunakannya, hal yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian intern adalah lingkungan pengendalian, penetapan resiko manajemen, sistem informasi dan komunikasi akuntansi, aktivitas pengendalian dan pemantauan.

Menurut COSO (*Commitee Of Sponsoring Organization of Treadway Commision*) dalam Theresia (2009) menyatakan bahwa pengendalian intern memberikan jaminan yang memadai dalam pencapaian salah satu atau lebih tujuan berikut ini : efisiensi dan efektivitas kegiatan (termasuk penilaian kinerja, pencarian laba dan pengamanan aktiva perusahaan), keterpercayaan informasi keuangan (pencegahan pemanipulasian laporan keuangan), dan kepatuhan dengan berbagai peraturan dan undang-undang yang harus dipatuhi oleh entitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 (2008) untuk memperkuat dan menunjang efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan dan telaahan seawajut. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Menurut Mulyadi (2002) efektivitas pengendalian intern dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian intern perusahaan. Efektivitas unsur pengendalian sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan oleh lingkungan pengendalian.

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah merupakan tahap dimana dilaksanakannya sistem pengendalian intern pemerintah yang mencakup unsur-unsur pengendalian intern yang sesuai dengan ketentuan yang ada, tepat

pada waktu yang telah ditetapkan, dan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan biaya yang dikeluarkan.

Menurut Fauzi dalam Agustin (2008), efektivitas dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan menggunakan sumber daya yang optimal.
- 2) Adanya perbaikan berkelanjutan.
- 3) Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.

a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Setiap organisasi dalam melaksanakan kegiatan organisasi harus mempunyai pengendalian. Hal tersebut agar apa yang di rencanakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dimana audit dalam laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh audit eksternal pada umumnya untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah tersebut, sedangkan audit atas penyusunan laporan keuangan oleh pengawas bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan terhadap sistem pengendalian intern dan koreksi atas kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Pengawasan intern merupakan proses audit, menurut pasal 1 ayat (1) PP No 60 tahun 2008, pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam PP No.60 tahun 2008 sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sebagai berikut:

“suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan” .

Dalam PP No 60 tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam SPAP seksi 319 mendefenisikan sistem pengendalian intern sebagai berikut:

“suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil dari suatu entitas yang dirancang untuk memberikan kepastian yang memadai bahwa tujuan organisasi berupa efektivitas efisiensi usaha, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan dan ketaatan pada peraturan dan perundangan yang berlaku dapat dicapai”.

Pengendalian intern menurut Bastian (2003) merupakan suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas dan segenap personil) yang mendesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan sebagai berikut: (1) Keandalan laporan keuangan, (2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) Efektivitas dan efisiensi operasi

Menurut Arens (2003) sistem pengendalian intern yang efektif adalah dengan menbandingkan biaya terhadap organisasi relatif terhadap laporan keuangan yang diharapkan: (1) Keandalan pelaporan keuangan, (2) Mendorong efisiensi dan efektivitas operasional, (3) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan

Hartadi (1992) sistem pengendalian intern mempunyai beberapa pengertian yaitu sistem pengendalian intern dalam arti sempit dan dalam arti luas, sebagai berikut:

“dalam arti sempit merupakan internal *check* yang merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi seperti mencocokkan penjumlahan mendatar (horinzontal) dan penjumlahan melurus (vertikal). Sedangkan sistem pengendalian intern dalam arti luas dapat di pandang sebagai sistem sosial (*social sistem*) yang mempunyai wawasan makna khusus yang berada dalam satu organisasi, sistem tersebut terdiri dari kebijakan, teknik, prosedur, alat-alat fisik, dokumentasi orang-orang yang berinteraksi satu sama lain yang diarahkan untuk :

- 1) Melindungi harta.
- 2) Menjamin terhadap teradinya hutang yang tidak layak.
- 3) Menjamin ketelitian dan dipercayainya data akuntansi.
- 4) Dapat diperolehnya operasi secara efisien.

5) Menjamin ditaatinya kebijakan organisasi.

Dapat dilihat bahwa pengendalian yang efisien dan efektif akan sangat berpengaruh dalam laporan keuangannya, karena jika Sistem Pengendalian Internnya baik maka laporan keuangan juga akan handal.

Menurut Bastian dan Gatot Soepriyanto (2002) sistem pengendalian intern merupakan struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

SAS No. 55 tentang Pertimbangan Pengendalian Internal dalam Audit Laporan Keuangan mendefinisikan bahwa:

“Pengendalian internal sebagai sebuah proses yang dihasilkan oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak dalam pencapaian tujuan kategori-kategori berikut: (1) keandalan (reliabilitas) laporan keuangan, (2) ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan (3) efektivitas dan efisiensi operasi.”

Sedangkan menurut Arens (2004) manajemen biasanya memiliki tiga perhatian berikut, atau sasaran hasil yang luas, dalam merancang suatu sistem kendali yang efektif, yaitu:

- 1) Keandalan laporan keuangan
Manajemen bertanggungjawab atas menyiapkan laporan keuangan untuk investor, kreditor, dan para pemakai lainnya. Manajemen mempunyai tanggung jawab baik hukum dan profesional untuk yakin bahwa informasi tersebut disiapkan secara wajar menurut sistem pelaporan seperti GAAP.

- 2) Efisiensi dan efektivitas operasional
Kendali di dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk mendorong penggunaan yang efektif dan efisien atas sumber dayanya, mencakup personil, untuk mengoptimalkan sasaran perusahaan. Bagian penting dari kendali ini adalah informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan internal.
- 3) Pemenuhan ketentuan hukum dan regulasi yang bisa diterapkan, organisasi diminta untuk mengikuti banyak hukum dan peraturan.

Dalam PP No 60 tahun 2008, tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara.
- 2) Keandalan pelaporan keuangan.
- 3) Pengamanan atas asset Negara.
- 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini dilakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan SPIP, pengawasan intern merupakan salah satu dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi tersebut. Lingkungan pengaturan pengawasan mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan. Sedangkan pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi

penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi SPIP serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Unsur sistem pengendalian intern dalam PP No.60 tahun 2008 mengacu pada Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan dalam lingkungan pemerintah pada berbagai Negara.

2. Lingkungan Pengendalian

Dalam PP No 60 tahun 2008 lingkungan pengendalian dimana pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dan keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap organisasi intern dan manajemen yang sehat.

Dalam penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya harus melalui :

- a. Penegakan integrasi dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Menurut Guy (2002) lingkungan pengendalian menentukan kualitas entitas dengan mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orang disekitarnya. Lingkungan pengendalian terdiri dari tujuh faktor:

- a. Integritas dan nilai-nilai etis,
Integritas dan nilai-nilai etis merupakan dasar penilaian, referensi dan gaya manajemen
- b. Komitmen terhadap kompetensi,
Komitmen terhadap kompetensi mengharuskan manajemen untuk mempertimbangkan tingkat kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan tertentu dan menggunakan karyawan dengan keahlian serta pengetahuan yang sesuai atas masing-masing pekerjaan.
- c. Partisipasi dewan direksi dan komite audit,
Dewan direksi dan komite audit umumnya bertugas mengarahkan dan mengawasi suatu entitas.
- d. Gaya operasi dan filosofi manajemen,
Filosofi manajemen dan gaya operasi merupakan pendekatan umum dalam menjalankan suatu entitas.
- e. Struktur organisasi,
Struktur organisasi entitas adalah bentuk dan sifat dari subunit-subunit yang dimilikinya serta fungsi manajemen dan hubungan pelaporan yang berkaitan dengan subunit tersebut.
- f. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab,
Manajemen dapat menggunakan berbagai metode untuk mempromosikan pemahaman ini, termasuk mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab atas aktivitas tertentu.
- g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia dan aplikasinya.
Kebijakan dan praktik seperti itu berkaitan dengan mempejakan, melatih, mengevaluasi, mempromosikan dan mengkompensasi karyawan serta memberikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan PSAP No.69 (2008) lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian

orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk suatu komponen pengendalian yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup faktor-faktor berikut ini:

- a. Integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Partisipasi dewan komisaris/komite audit.
- d. Filosofi dan gaya operasi manajemen.
- e. Struktur organisasi.
- f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab.
- g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia (SDM).

Sedangkan menurut Arens (2004) lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur, dan pemilik dari suatu entitas mengenai pengendalian internal dan arti penting bagi entitas yang bersangkutan.

Menurut Agung (2008) lingkungan pengendalian merupakan kondisi lingkungan organisasi yang menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran akan pengendalian. Lingkungan merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, meliputi integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

Menurut Bastian (2003) lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang mempengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain :

- a. Nilai integrasi dan etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Filosofi dan gaya operasi manajemen.
- d. Struktur organisasi.
- e. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab.
- f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia (SDM).

Dari uraian di atas, bisa kita lihat bahwa nilai etika dan integrasi, serta sumber daya manusia sangat mempengaruhi lingkungan pengendalian dalam penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah.

3. Penilaian Risiko

Dalam PP No 60 tahun 2008 penilaian risiko harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri dari (1) Identifikasi risiko, (2) Analisis risiko.

Menurut COSO dalam Marbunwis (2010) resiko merupakan hal-hal yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan. Identifikasi terhadap resiko

diperlukan untuk mengetahui potensi-potensi kejadian yang dapat menghambat dan menghalangi terwujudnya tujuan organisasi. Setelah dilakukan identifikasi maka dilakukan analisis terhadap resiko meliputi analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis resiko akan menentukan dampak kejadian, serta merupakan input untuk mendapatkan cara mengelola resiko tersebut. Hal yang terutama dalam penilaian resiko ini adalah adanya kesadaran pegawai dan pimpinan instansi pemerintahan bahwa setiap kegiatan pokok pekerjaan, memiliki resiko yang harus dikelola. Pengelolaan akan tergantung pada tingkat resiko yang dihadapi.

Berdasarkan PSAP No.69 (2008) penaksiran resiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis dan pengelolaan resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan ekstern yang mungkin terjadi dan secara negatif berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan *asersi* manajemen dalam laporan keuangan.

Menurut Agung (2008) penilaian resiko merupakan proses yang meliputi identifikasi, analisis dan pengelolaan resiko yang dihadapi oleh manajemen, yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam Arens (2004) penilaian risiko untuk pelaporan keuangan adalah identifikasi

manajemen dan analisis risiko yang relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Sedangkan menurut Bastian (2003) penaksiran risiko untuk tujuan laporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU).

Penaksiran risiko mencakup pertimbangan khusus risiko yang timbul dari :

- a. Perubahan standar akuntansi yang baru.
- b. Hukum dan peraturan yang baru.
- c. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengelolaan informasi.
- d. Pertumbuhan pesat suatu entitas yang menurut perubahan fungsi pengelolaan dan pelaporan informasi dan karyawan yang terlibat dalam fungsi tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, bisa dilihat bahwa penilaian risiko dalam organisasi, dimana pimpinan harus menganalisis dan mengidentifikasi semua yang terjadi dalam organisasi tersebut untuk penerapan sistem pengendalian intern yang baik.

4. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan apakah pengarahannya pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut BPKP RI kegiatan pengendalian merupakan salah satu komponen pengendalian intern yang berupa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuan operasional dan kaitannya dengan pelaporan keuangan. Lima kategori dari kegiatan pengendalian meliputi :

a. Pemisahan tugas yang memadai.

Pemisahan tugas yang memadai dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

b. Otorisasi transaksi dan aktivitas yang seharusnya.

Setiap transaksi harus diotorisasi dengan semestinya apabila pengendalian ingin dicapai secara memuaskan. Otorisasi merupakan keputusan kebijakan yang dapat bersifat umum maupun khusus.

c. Dokumen-dokumen dan catatan yang memadai.

Dokumen dan catatan merupakan bukti fisik atas transaksi yang dicatat dan diikhtisarkan.

d. Pengendalian fisik atas aktiva dan pencatatan yang memadai.

Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan menjadi unsur yang penting bagi pengendalian intern yang memadai untuk mencegah kerugian atau kehilangan atas aktiva dan catatan.

- e. Pengecekan yang independen atas kinerja.

Verifikasi internal independen yang dilakukan secara terus-menerus dan hati-hati perlu dilakukan untuk menemukan kekeliruan atau ketidakberesan dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan PP No.60 tahun 2008 Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian yang terdiri atas :

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
- b. Pembinaan sumber daya manusia.
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
- d. Pengendalian fisik atas aset.
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.
- f. Pemisahan fungsi.
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.

k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Berdasarkan PSAP No.69 (2008) aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian meliputi:

1. Review kinerja.
2. Pengolahan informasi
3. Pengendalian fisik.
4. Pemisahan tugas.

Menurut Agung (2008) kegiatan pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Dalam kegiatan pengendalian meliputi revidu kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, serta pemisahan tugas. Dalam Arens (2004) aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur, sebagai tambahan yang termasuk dalam empat komponen yang lain, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu telah diambil untuk mengatasi resiko dalam pencapaian sasaran hasil entitas.

Sedangkan dalam Bastian (2003) aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah

dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas.

Aktivitas pengendalian dapat dibagi beberapa kelompok antara lain :

- a. Pengendalian pengolahan informasi.
 - 1) Pengendalian umum
 - 2) Pengendalian aplikasi
- b. Pemisahan fungsi yang memadai.
- c. Pengendalian fisik atas kekayaan pemda dan catatan.
- d. Reviu atas kinerja.

Dari penjelasan diatas bahwa kegiatan pengendalian harus melakukan pemisahan fungsi dan pengendalian informasi untuk dapat mengurangi risiko yang terjadi dalam suatu organisasi atau instansi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rumondang (2010). Dalam penelitian Rumondang tersebut menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian adalah faktor yang terbesar yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah Kota Padang. Dan faktor terendah adalah pemantauan, dimana faktor-faktor yang digunakan adalah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori diatas yang dapat dijelaskan bahwa lingkungan pengendalian, resiko pengendalian dan penilaian resiko berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

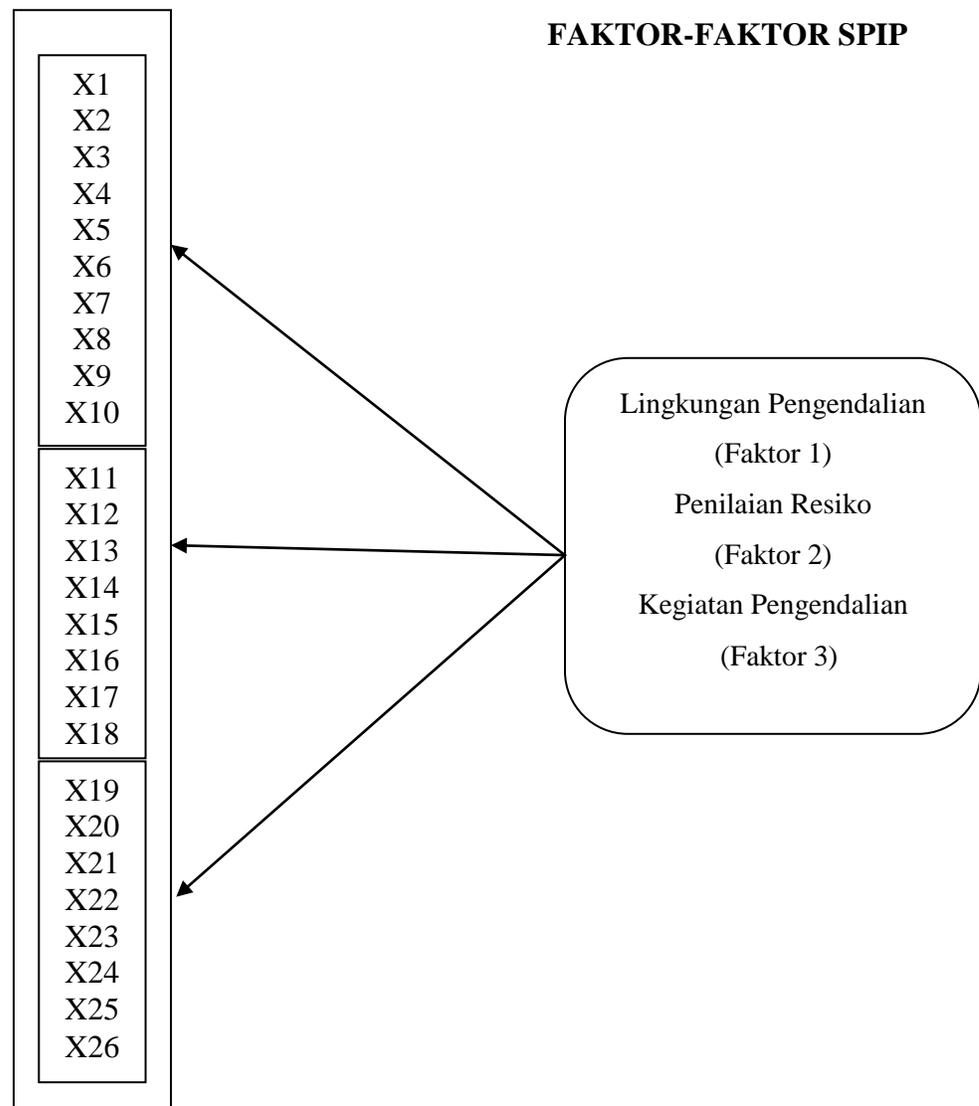
Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sistem perbendaharaan negara belum sepenuhnya terkonsolidasi dengan baik, sistem akuntansi umum belum selaras dengan sistem akuntansi instansi maupun hutang negara belum tertata dengan baik.

Efektivitas organisasi suatu perusahaan mengandung arti sebagai pengukuran atas prestasi yang telah dicapai oleh setiap unit kerja atau unit usaha dari organisasi tersebut yang melaksanakan keseluruhan rencana sesuai dengan yang dikehendaki secara tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan demikian jelas bahwa setiap organisasi atau instansi perlu sekali untuk memperhatikan faktor efektivitas disamping efisiensi, begitu juga dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Lingkungan pengendalian sebagai dasar utama dalam faktor penerapan sistem pengendalian intern pemerintahan sehingga keberadaan bagi penilaian

resiko, dan kegiatan pengendalian. Tanpa lingkungan pengendalian yang efektif, maka penilaian resiko, dan kegiatan pengendalian tidak akan menghasilkan pengendalian inter yang efektif, tanpa menghiraukan kualitasnya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian adalah faktor tertinggi yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada instansi pemerintah daerah kota Padang, yaitu sebesar 18,987%.
2. Penilaian resiko memberikan pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada instansi pemerintah daerah kota Padang sebesar 12,060%
3. Kegiatan pengendalian memberikan pengaruh paling rendah terhadap efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada instansi pemerintah daerah kota Padang, yaitu sebesar 8,089%

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Pemilihan variabel yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah hanya terdiri dari tiga variabel saja yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko dan kegiatan pengendalian. Hal ini memungkinkan terabainya faktor lain yang mungkin dapat mempunyai pengaruh lebih terhadap efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
2. Penelitian ini hanya meneliti jumlah responden atau sampel yang masih relatif kecil, sehingga masih belum dapat mewakili populasi secara keseluruhan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak:

1. Bagi instansi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik. Sehingga kesalahan-kesalahan yang menyebabkan efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat dikurangi sampai batas minimum.
2. Untuk penelitian berikutnya dapat melakukan perluasan sampel penelitian karena pada penelitian ini hanya dilakukan di Kota Padang. Atau juga dapat memfokuskan hanya pada satu SKPD sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih memuaskan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dilanjutkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel lain berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).